

INVESTASI ASING JEPANG DI INDONESIA MASA ORDE BARU TAHUN 1967-1974

MIFTAKHUL RIZKI

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail : daka_classic@yahoo.co.id

NASUTION

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Jepang telah mengalami pertumbuhan ekonomi hingga mampu melakukan ekspansi perusahaannya ke Asia sampai ke Indonesia. Keterbatasan sumber daya alam, tingginya upah angkatan kerja, dan sempitnya lahan-lahan industri merupakan latar belakang bagi Jepang untuk melakukan ekspansi ekonominya ke luar Jepang. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki sumber daya yang diperlukan bagi Jepang. Indonesia telah membuka pintu lebar bagi investasi asing dengan mengeluarkan Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Melalui kebijakan tersebut pemerintah Indonesia mendorong pertumbuhan investasi asing di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan investasi asing Jepang di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan investasi asing Jepang di Indonesia pada masa Orde baru. Penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa investasi asing Jepang di Indonesia mendominasi hampir semua sektor usaha yang menimbulkan kesenjangan dengan perusahaan pribumi.

Kata kunci : investasi asing, investasi Jepang

Abstract

Japan has been increase that's economic growth, until the company is able to expand to Asia and also Indonesia. Limited natural resources, the high wage labor force, and the narrowness of the industrial lands a backdrop for Japan to expand its economy to the outside Japan. Indonesia is one country that has the necessary resources for Japan. Indonesia has opened the doors wide for foreign investment by issuing Law No. 1 of 1967 on foreign investment. Policy through the Indonesian government is encouraging the growth of foreign investment in Indonesia. Formulation of the problem in this research is how the development of Japanese foreign investment in Indonesia. This research aims to analyze the development of Japanese foreign investment in Indonesia during the New Order. This writing etode sejarah research, namely heuristic, criticism, interpretation and historiography. Based on the research it is known that the Japanese foreign investasi in Indonesia dominate nearly all business sectors that cause the gap with indigenous companies.

Keyword: *foreign investment, Japan investment*

PENDAHULUAN

Jepang merupakan salah satu Negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi secara pesat. Dalam pertengahan terakhir tahun 1960-an, Jepang yang sebelumnya mengalami devisa neraca pembayaran mengalami surplus yang terus menerus sejalan dengan pertumbuhan

ekonomi yang cepat yang dipusatkan dalam industri berat dan petrokimia. Melalui pertumbuhan dana-dana surplus, Jepang mulai menginvestasi dana-dana surplus di luar Jepang khususnya Indonesia. Investasi dana-dana surplus tersebut dimaksudkan untuk mendapat sumber-sumber alam guna mencukupi kebutuhan industri, serta mengambil keuntungan dari tenaga murah di Indonesia

serta untuk memelihara pusat-pusat pasar yang luas di wilayah Indonesia, serta mencari tempat-tempat industri yang semakin sukar diperoleh di Jepang.¹

Masa orde baru banyak melakukan perombakan-perombakan terhadap kebijakan sistem ekonomi. Keadaan Ekonomi yang buruk dengan inflansi mencapai 650% mengharuskan pemerintah Orde Baru untuk segera melakukan pengendalian ekonomi dan segera melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Untuk memperbaiki keadaan ekonomi memerlukan pembiayaan dan modal yang besar. Modal dan pembiayaan tersebut dapat didapatkan melalui pinjaman, bantuan asing dan investasi asing. Namun yang lebih efisien adalah melalui investasi asing secara langsung, karena dapat menciptakan lapangan kerja untuk penduduk Indonesia tanpa pemerintah mengeluarkan pembiayaan dan proyek yang besar.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan investasi asing Jepang di Indonesia pada masa Orde baru. Sumber utama dalam penulisan ini yakni: Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Instruksi presidium kabinet Nomor: 06/EK/IN/1/1967 tentang tata cara penanaman modal asing di Indonesia. serta koran dan majalah sejaman dari Kompas dan Tempo.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan. Yang pertama adalah tahapan Heuristik dengan pengumpulan sumber-sumber yang terkait dengan penulisan, yang kedua adalah tahapan kritik dengan menguji keabsahan sumber sehingga dapat menemukan fakta Sejarah. Langkah ketiga adalah interpretasi dengan menghubungkan berbagai fakta dalam sumber yang didapatkan kemudian dituliskan sebagai langkah terakhir (heuristik).

Sumber utama dalam penulisan ini yakni: Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Instruksi presidium kabinet Nomor: 06/EK/IN/1/1967 tentang tata cara penanaman modal asing di Indonesia. serta koran dan majalah sejaman dari Kompas dan Tempo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. EKSPANSI PERUSAHAAN JEPANG

Jepang merupakan salah satu Negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi secara pesat. Dalam pertengahan terakhir tahun 1960-an, Jepang yang sebelumnya

mengalami devisa neraca pembayaran mengalami surplus yang terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat yang dipusatkan dalam industri berat dan petrokimia. Melalui pertumbuhan dana-dana surplus, Jepang mulai menginvestasi dana-dana surplus di luar Jepang khususnya Indonesia. Investasi dana-dana surplus tersebut dimaksudkan untuk mendapat sumber-sumber alam guna mencukupi kebutuhan industri, serta mengambil keuntungan dari tenaga murah di Indonesia serta untuk memelihara pusat-pusat pasar yang luas di wilayah Indonesia, serta mencari tempat-tempat industri yang semakin sukar diperoleh di Jepang.²

Menurut Okada Osamu, Motivasi Jepang untuk melakukan investasi asing berdasarkan hasil-hasil Questionnaire yang dilakukan oleh kementerian perdagangan Internasional maret 1977 dengan menanyakan motivasi-motivasi perusahaan-perusahaan Jepang untuk bergerak ke Asia. Terdapat tiga tujuan utama Jepang dalam ekspansi ekonomi keluar Jepang, yakni: (1) mendapat dan membuka pasar (2) Tersedianya tenaga kerja yang murah (3) memperoleh sumber-sumber alam.

1. Membuka Pasar

Perkembangan industri di Jepang mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah keterbatasan wilayah pemasaran untuk memasarkan produk hasil industri. Banyaknya jumlah produksi yang berdiri di jepang mengakibatkan persaingan yang ketat di Jepang untuk memasarkan hasil produksinya. Jalan yang di tempuh untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuka pasar perdagangan baru di luar kawasan jepang.

Langkah pertama yang dilakukan Jepang untuk ekspansi pasar Jepang adalah dengan memanfaatkan perang Asia. Jepang berperan dalam mensuplay kebutuhan perang untuk pasukan-pasukan Amerika Serikat setelah meletusnya Perang Korea 1950. Jepang memperoleh pendapatan dari perjanjian keamanannya dengan AS. Jepang juga melebarkan ekspansi pasar perdagangannya ke korea selatan melalui penandatanganan perjanjian antara jepang dan korea selatan untuk membuka pintu perdagangan bagi perusahaan-perusahaan jepang. Pasar terbuka di korea Selatan untuk perusahaan jepang memberikan kemudahan Jepang dalam memasarkan produk-produk hasil industrinya.

Jepang melebarkan sayap perdagangannya ke Asia tenggara dengan jalan membayar kerugian perang

¹ Okada Osamu. 1979. "Ekspansi Ekonomi ke Asia Tenggara: Tinjauan Perdagangan Jepang dan Asean". Prisma 11 November. Hlm. 85

² Ibid. Hlm. 85

yang disebabkan Jepang dalam perang dunia II. Jepang memberikan pembayaran pampasan kerugian perang berupa barang-barang, Jasa dan teknik yang di datangkan dari Jepang. Banjir produk-produk Jepang di kawasan Asia tenggara membuat wilayah tersebut semakin tergantung pada perdagangan Jepang. Dari pembayaran pampasan perang kepada Asia tenggara tersebut Jepang mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan pembiayaan pampasan perang.

2. Mendapatkan sumber daya alam

wilayah Jepang miskin akan sumber daya alam akibatnya tidak tersidanya sumber daya alam bagi bahan baku industri Jepang. Kehidupan industri Jepang sangat tergantung dengan impor barang-barang kebutuhan produksi. 99,8 % konsumsi minyak kasar, 75,9 % gas Alam, 99,6% biji besi, 76,8 % batubara, 91,6 % tembaga, 96,4 % timah, dan 100% nikel dan bauksit.³ Oleh karena itu Jepang menjalin hubungan perdagangan yang erat dengan Negara-negara yang memiliki sumberdaya Alam melimpah. Hubungan perdagangan Jepang menggunakan Pola arus timbal balik. Jepang mengimpor bahan-bahan mentah keperluan industri dari Negara yang memiliki sumber daya alam kemudian Jepang mengeksport kembali hasil produksinya ke Negara tersebut.

Studi kasus perdagangan Jepang adalah dengan Asia tenggara. Sejak tahun 1968 Jepang telah menjadikan Asia tenggara sebagai pasar ekspor dan impor terbesar. Dalam tahun 1977 Jepang telah mengeksport hasil produksinya ke Asia tenggara sebesar AS \$ 17.126 juta atau 21,3% dari total ekspor Jepang. Sementara untuk impor Jepang dari Asia Tenggara sebesar AS \$ 15.077 juta atau 21,3% dari seluruh total impor Jepang. 96, 8% dari ekspor Jepang ke Asia Tenggara adalah berupa barang-barang manufaktur, dengan produk-produk berat dan petrokimia berjumlah 85,0% dan barang-barang manufaktur ringan berjumlah 11,8%. Untuk produk impor Jepang dari Asia tenggara 91,9% berupa minyak kasar, bahan-bahan mentah seperti tembaga, bauksit, nikel, dan pelikan lain. 11 % impor Jepang berupa bahan-bahan pangan.⁴ Dari kelima Negara di Asia tenggara hanya Indonesia dan Malaysia yang memiliki sumber daya alam yang diperlukan bagi industri Jepang. Sementara ketiga Negara lain Singapura, Thailand dan Filipina hanya berperan sebagai basis pasar ekspor Jepang.

Pengiriman bahan-bahan mentah dari Negara-negara penyedia sumber daya Alam ke Jepang yang

lokasinya cukup jauh merupakan kendala bagi produksi Jepang. Biaya yang di keluarkan Jepang untuk beban pengiriman bahan-bahan produksi mengakibatkan pembengkakan biaya produksi. Untuk mengatasi masalah tersebut perusahaan-perusahaan swasta Jepang mendirikan perusahaan multinasional di Negara-negara penyedia sumberdaya alam. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh JETRO,⁵ pada perusahaan-perusahaan Jepang 27 dari 32 perusahaan yang di wawancarai memilih Asia sebagai invansi perusahaan mereka. Prioritas utama dari invansi perusahaan tersebut adalah Indonesia dan Brazilia. Menurut kalangan JETRO alasan mereka memilih invensi di wilayah tersebut karena tingkat upah yang masih rendah dan mudah dalam mendapatkan daerah lokasi industri.

Pemerintah Jepang telah mendukung pendirian industri-industri di luar Jepang pada Negara-negara yang memiliki sumber daya Alam bagi kebutuhan bahan industri. Badan penasihat untuk MITI,⁶ dalam laporannya berjudul *the long time vision for the industrial structure* (rencana jangka panjang untuk struktur industri) menerangkan agar meningkatkan industri-industri berat, dan petrokimia sebagai pembuatan baja, pulp, dan barang-barang kimia haruslah ditempatkan di seberang lautan agar dapat menetapkan tipe baru pembagian kerja Internasional dengan Negara-negara kaya sumber dengan hanya pengelolaan terakhir, daripada industri-industri padat pengetahuan dilakukan di Jepang. Adanya pembatasan pendirian industri di Jepang juga disebabkan karena kelebihan industri di Jepang yang mengakibatkan banyak polusi. Protes dari warga Jepang terhadap polusi yang semakin meningkat dari industri-industri Jepang mengakibatkan semakin sulit untuk mendirikan industri di Jepang dan lebih tertarik mendirikan industri di luar wilayah Jepang khususnya Indonesia karena banyak lahan industri yang masih tersedia dan tidak terdapat larangan yang mengatur untuk berpolusi.

3. Ketersediaan Tenaga Kerja Murah

Pertumbuhan ekonomi Jepang yang tinggi mengakibatkan tingginya pendapatan perkapita Jepang. Tingginya pendapatan perkapita berpengaruh pada mahalnnya upah buruh pada perusahaan-perusahaan industri Jepang. Tingginya upah buruh akan memperbesar biaya produksi dan memperkecil jumlah keuntungan pihak perusahaan industri Jepang. Dengan didirikannya industri ke luar Jepang akan

³ Ibid. Hlm. 86

⁴ Ibid. Hlm. 82

⁵ *Jepang datang melihat & menerkam*. Tempo. 15 september 1973. Hlm. 44

⁶ Ibid. Hlm. 45

mempekerjakan penduduk luar Jepang dengan upah yang rendah. Berdasarkan *questionnaire*⁷ yang dilakukan oleh kementerian perdagangan internasional maret 1977, rata-rata gaji bulanan yang dibayar perusahaan-perusahaan manufaktur dengan operasi seberang lautan adalah Y 205.000, dibayar kepada anak perusahaan di Amerika Y 289.000, sedangkan yang dibayar kepada anak perusahaan di Asia tenggara hanya sebesar Y 50.000.

B. PERKEMBANGAN INVESTASI ASING JEPANG

Perkembangan ekspansi perdagangan Jepang telah melahirkan banyak anak cabang perusahaan di luar kawasan Jepang atau dikenal dengan perusahaan Multinasional. Dengan menyebarnya perusahaan multinasional ke Negara-Negara luar Jepang maka akan menyebarkan modalnya ke Negara-negara lain. Setelah berakhirnya perang Dunia II, Amerika Serikat menyuntikkan investasi langsung kepada Jepang yang dapat membangkitkan perusahaan Jepang dan memberikan stimulus bagi para pengusaha Jepang untuk menanamkan modalnya di dalam Jepang sendiri maupun di luar Jepang. Pada tahun 1951 Jepang menginvestasikan dalam pembangunan perusahaan biji besi di Goa, India. Investasi tersebut merupakan investasi pertama Jepang sesudah perang Dunia II.⁸

Karakteristik investasi asing Jepang adalah dalam bidang perdagangan dan keuangan, Investasi perdagangan dan keuangan adalah investasi terbesar dengan nilai investasi US \$ 7.654 juta atau sekitar 34,5 % dari investasi seluruhnya.⁹ Jepang memperluas laju investasinya di Negara-negara lain melalui perusahaan dagang. Perusahaan-perusahaan besar Jepang seperti Mitsubishi, Mitsui, Hitachi, Sharp, dll. Perusahaan-perusahaan besar tersebut tidak hanya melebarkan ekspansinya dengan mendirikan perusahaan-perusahaan multinasional ke Negara-negara lain, tetapi juga semakin gencar meningkatkan investasi asingnya di Negara-negara lain. Bilamana di dalam suatu Negara terdapat perusahaan manufaktur yang memberikan peluang untuk mendirikan usaha joint venture, Perusahaan-perusahaan Jepang akan menginvestasikan modalnya untuk menjadi partner dalam usaha joint venture tersebut.

Tatsuo Murano dan John O. Tomb¹⁰ dalam kertas kerja yang diterbitkan *Sanwa Bank Ltd* dalam

judulnya: *Japan's answer to the multinational enterprise* berdasarkan pengamatan di seluruh Dunia, memberikan alternatif kepada perusahaan-perusahaan raksasa Jepang untuk tidak hanya sebagai pengkiblat perusahaan-perusahaan besar Eropa dan Amerika saja. Bahkan perusahaan-perusahaan raksasa Jepang dapat melompati perusahaan-perusahaan besar di Eropa dan Amerika tanpa menanggung resiko-resiko yang kurang sedap.

Menurut Tomb dan Murano, Cara yang harus ditempuh Jepang untuk mengimbangi perusahaan raksasa Eropa dan Amerika adalah dengan melalui pola perusahaan multinasional. Melalui perusahaan multinasional Jepang menyalurkan investasinya secara langsung dengan mendirikan anak perusahaan besar Jepang di Negara tempat investasi. Investasi dengan cara ini akan mempermudah Jepang dalam menentukan pusat-pusat pemasaran, pusat-pusat produksi, serta pusat-pusat penelitian dan pengembangan.

Perkembangan investasi asing Jepang khususnya di kawasan Dunia ketiga lebih dapat mudah berkembang karena perusahaan-perusahaan yang berdiri di Negara-negara dunia ketiga belum berkembang dan masih dalam taraf perusahaan kecil. Selain itu peran aktif pemerintah Jepang dalam menjembatani kerjasama investasi asing mempermudah perusahaan-perusahaan Jepang dalam menjalankan investasi asing. Berbagai langkah pemerintah Jepang dilakukan untuk mendorong laju investasi asing ke luar Jepang. Berbagai duta ekonomi swasta dan pemerintah hilir mudik ke luar Jepang untuk mengadakan kontrak hubungan kerjasama di negara yang di tanamkan investasi Jepang. Demi terlaksananya jalannya kontrak investasi dengan perusahaan swasta maupun pemerintah tidak jarang investor Jepang menggunakan komisi demi terciptanya negosiasi yang di inginkan.

Investasi perusahaan Jepang tumbuh dengan pesat pada pertengahan tahun 1960, dengan menginvestasikan US \$ 3.494 juta dengan mendirikan 3.097 usaha. Investasi Jepang yang dilakukan sejak tahun 1972 berjumlah US \$ 5.340 juta atau 84 % dari total investasi ditanamkan di Asia. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Jerman yang menanamkan sebagian besar modalnya ke Negara-negara maju, Jepang justru menanamkan modalnya pada Negara-negara Dunia ketiga yang memiliki sumberdaya Alam melimpah. Menurut hasil *questionnaire* yang dilakukan oleh kementerian perdagangan Internasional maret 1977,¹¹ ekspansi yang dilakukan perusahaan-perusahaan Jepang bergerak ke Asia adalah: membuka pasar, tersedianya tenaga kerja yang murah,

⁷ Okada osamu. Op. Cit. Hlm.85

⁸ Ibid. Hlm.83

⁹ Ibid. Hlm.82

¹⁰ *Zaibatsu Post Romusha*. Tempo 1 Agustus 1973. Hlm.38

¹¹ Okada Osamu. Op. Cit. Hlm.85

memperoleh sumber-sumber Alam. Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Sumberdaya alam Jepang yang tidak mencukupi kebutuhan industri, mendorong Jepang untuk mencari sumberdaya alam di Negara lain untuk memenuhi bahan baku industrinya. Dengan demikian sebagian besar investasi asing Jepang tertuju pada pembangunan minyak, gas alam, dan bauksit, serta sumber-sumber alam yang sangat penting bagi industri Jepang. Sedangkan untuk Investasi Jepang dalam industri manufaktur masih rendah bila di bandingkan dengan Negara-negara maju lainnya. Namun di Asia investasi dalam bidang manufaktur hampir sebagian besar berasal dari Jepang. Investasi manufaktur Jepang yang paling besar di Asia adalah Tekstil.

C. PERKEMBANGAN INVESTASI ASING JEPANG DI INDONESIA

Hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang sesudah perang dunia II, diawali dengan adanya program pembayaran pampasan kerugian perang kepada Indonesia pada tahun 1956 yang ditandatangani oleh Soekarno dan Menteri Keishi yang menjabat sebagai menteri perdagangan dan industri pada waktu pemerintahan kabinet Tojo. Keishi memberikan otoritas kepada Kinoshita & co yang kemudian diserap oleh Mitsui & co untuk melakukan monopoli dengan mengurus barang dan jasa dalam program pembayaran pampasan perang yang senilai Y 80.390 juta. Namun dalam pembayaran pampasan perang tersebut banyak dana yang masuk dalam birokrasi Indonesia yang dikenal dengan nama *Indonesia lobby*. Dengan adanya program pembayaran pampasan perang tersebut banyak produk-produk dan jasa dari Jepang yang masuk dan berkembang di Indonesia.

Pemerintah Orde baru mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing untuk menarik investasi asing di Indonesia dengan persyaratan-persyaratan yang minimal. Pemerintah banyak memberikan insentif-insentif pajak kepada para investor asing diantaranya: keringanan-keringanan pajak bagi investor asing yang menanamkan modal di Indonesia. Pada pasal 15 dalam Undang-undang No. 1 tahun 1967 insentif-insentif pajak yang diberikan diantaranya, pembebasan pajak keuntungan perusahaan sampai lima tahun, pembebasan pajak deviden, pembebasan pajak dari material modal, pembebasan pajak bea masuk impor peralatan, mesin, dan alat-alat yang dibutuhkan dalam menjalankan perusahaan asing.¹² Sejak dibukanya investasi asing di Indonesia

¹² UU No. 1 Tahun 1967 mengenai penanaman modal asing

Jepang mempercepat laju pertumbuhan investasinya di Indonesia.

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan Sumber daya Alam terutama bahan-bahan tambang yang sangat di butuhkan bagi perusahaan Jepang. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak di barengi dengan modal, teknologi, dan kemampuan pengelolaan dalam mengeksploitasi sumberdaya alam yang dimiliki. Melalui investasi asing pengelolaan sumber daya alam akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Selain itu adanya perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di Indonesia di harapkan dapat menampung banyak pekerja dari Indonesia sehingga dapat mengurangi pengangguran. Didalam pembahasan RAPBN di DPRGR PNI menmenyaranakan agar investasi asing diprioritaskan pada usaha-usaha yang menampung banyak pekerja¹³.

Perkembangan Investasi Jepang di Indonesia juga disebabkan karena dukungan pemerintah dari kedua belah pihak. Dari pemerintah Indonesia yang memberikan rangsangan kepada para Negara-negara kreditur untuk memberikan investasinya di Indonesia. Mulai dari Adam Malik¹⁴, Sri Sultan, Widjaja Nitisastra, Emil Salim, Frans Seda, mereka semua gencar untuk memprimosikan pintu terbuka bagi investasi asing di Indonesia. Menurut Chujiro Fujino¹⁵ perwakilan dari Mitsubishi pada misi muhibah mengatakan bahwa kestabilan politik pada masa Soeharto dan Emilico Garastazu Medici merupakan "faktor yang sangat berpengaruh". adanya dukungan dari pemerintah Jepang untuk melakukan pengembangan investasi asing ke luar Jepang, Jepang mengalami Surplus dolar yang meningkat tajam sejak revolusi Yen yang kedua. Melalui perusahaan-perusahaan besar Jepang seperti di antaranya, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo dan Sogo sosa investasi-investasi asing Jepang di salurkan ke Indonesia.

Dalam melancarkan negosiasi pemerintah Jepang tidak segan-segan memberikan "pelicin" kepada Negara partner. Pada saat konferensi pers pada saat perusahaan-perusahaan Jepang di Wisma Nusantara para pengusaha-pengusaha Jepang dan pemerintah menyodorkan berbagai rencana investasi menjelang pelita II. Yang kabarnya dalam memperlancar hubungan kerjasama Jepang dengan Indonesia, Jepang telang menyediakan hadiah pesawat terbang untuk Indonesia. Namun melalui Aspri Sudjono Humardhani

¹³ Kompas. 23 Januari 1971.

¹⁴ *Sebabnja Indonesia dibandjiri kredit*. Sketmasa .Edisi 92 No.92-th-XII-1969. Hlm.12

¹⁵ *Jepang datang melihat & menerkam*. Tempo. 15 September 1973.

agar hadiah tersebut disalurkan untuk perbaikan pendidikan teknik di Indonesia.¹⁶ Meskipun Isamu Noto menyangkal usaha Jepang dalam menghalalkan berbagai macam taktik dan siasat untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Namun terdapat bukti yang menguatkan adanya hal tersebut, salah satunya dalam kasus masuknya Sumitomo Shoji Kaisha kedalam sektor penggilingan beras yang sesungguhnya tertutup bagi investor asing berdasarkan PP No.65/1971.¹⁷

Sejak 1967-1970 tercatat 22 Negara menanamkan modal di Indonesia¹⁸, dari 22 Negara yang menanamkan investasinya di Indonesia pada tahun kuartal pertama dibukanya investasi asing di Indonesia Jepang merupakan investor ketiga terbesar setelah Amerika serikat dan filiphina dengan nilai investasi US \$ 156,62 juta. Sejak akhir maret 1977 Jepang merupakan investor terbesar di Indonesia dengan nilai investasi US 3.128 juta dalam 728 perusahaan¹⁹. Berdasarkan analisa industri, investasi Jepang di Indonesia 66,8 % ditanamkan pada sektor pertambangan. 24,1 % investasi asing Jepang ditanamkan pada sektor manufactur..

Sebagian besar investasi asing Jepang ditanamkan dalam sektor pertambangan, berjumlah sebesar US \$ 2.491 juta yang terdiri 142 perusahaan. Investasi tersebut ditanamkan untuk pembangunan minyak, gas alam, dan bauksit, serta sumber-sumber alam yang sangat penting bagi kelangsungan industri-industri Jepang. Banyak dari investasi-investasi pertambangan yang ditanamkan Jepang sebagian besar adalah Indonesia. Dari total jumlah investasi pertambangan Jepang di seluruh dunia sebesar US \$ 5.311 juta, sejumlah US \$ 2.088 juta atau berkisar 40% di investasikan Jepang di Indonesia²⁰.

Sejak tahun 1970 Jepang telah menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia dalam Pertamina.²¹ Kerjasama Jepang di Indonesia telah meningkatkan pendapatan Indonesia dari penjualan LNG atau gas alam kepada Jepang. Bahkan hingga penjualan gas alam Indonesia pada saat itu dapat melampaui penjualan Iran, meskipun hal tersebut terjadi karena Iran memblokir Gas alamnya kepada Negara-negara Eropa dan Jepang. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara pengekspor gas alam terbesar kedua setelah Arab Saudi. Dari 45 % total

kebutuhan gas alam Jepang, 15 % dapat dipenuhi dari gas alam Indonesia.

Investasi manufaktur Jepang terbesar adalah dalam industri tekstil yaitu berkisar 40 %. Dari total industri manufaktur Jepang, Perusahaan tekstil Jepang berkembang di Indonesia pada tahun 1970. Perusahaan-perusahaan tekstil Jepang membentuk perusahaan sendiri maupun menjalin hubungan partner perusahaan tekstil Jepang, masing-masing perusahaan tekstil Jepang bersaing dan memiliki anak perusahaan di Indonesia. Dari lima perusahaan tekstil terbesar di Jepang, empat diantaranya Toray, Teijin, Kanebo, dan Toyo Menka telah memasuki pasaran tekstil di Indonesia.

Perusahaan tekstil terbesar Jepang yang memiliki jaring terluas di Indonesia adalah Toray Industri Inc. Diantara 16 perusahaan tekstil PMA di Indonesia 6 diantaranya di kuasai oleh Toray. Selain menggandeng perusahaan-perusahaan tekstil, Toray juga menggandeng partner dagang lainnya diantaranya: Ikeo Stocks, kurashiki Spinning, Chory dan dan Tohnen Partner-partner dari Toray tersebut terjalin kerjasama yang rapi yang memiliki pembagian tugas pada masing-masing perusahaan, meliputi pemintalan, pertununan, finishing, pembuatan serat nylon polyester, tekstil bahan kemeja, tekstil bahan celana sampai pembuatan kaos kaki cap swan.²²

Untuk menyediakan alat-alat mesin untuk industri tekstil, telah tumbuh perusahaan Jepang di Indonesia yang mengadakan Joint Venture dengan perusahaan-perusahaan Indonesia, yaitu Suzuki Loom Manufacturing dengan Nichimen, PT. Barata, PT. Bina Usaha Indonesia, dan PT. Sabang Merauke yang merindikan industri mesin tekstil di Bandung. Namun pada kenyataannya perusahaan asing non Jepang masih menggunakan mesin-mesin yang di datangkan dari Taiwan, Hongkong, dan Singapura.

Persaingan-persaingan yang terjadi antara perusahaan-perusahaan tekstil Jepang dengan perusahaan tekstil Indonesia membuat perusahaan-perusahaan Tekstil di Indonesia tergabung dalam Textile Club yang diketuai oleh Musa presiden direktur PT. Daya Manunggal. Perusahaan-perusahaan finishing dan printing yang tergabung dalam printing club kemudian memutuskan untuk menggabungkan diri kedalam textile club yang beranggotakan 40 perusahaan nasional. Untuk dapat menyaingi perusahaan-perusahaan tekstil Jepang, textile club menginginkan untuk memasuki industri petrokimia. Hal tersebut

¹⁶ Ibid. Hlm.44

¹⁷ Ibid. Hlm.49

¹⁸ Kompas. 8 maret 1971

¹⁹ Okada Osamu. Loc.Cit. Hlm.90

²⁰ Ibid. Hlm.82

²¹ Kompas. *Kunci hubungan kerjasama Jepang-Indonesia*. Hlm.10

²² *Terhimpit Gajah Jepang dan Non-Jepang*. Tempo. 15 september. Hlm. 47

dikarenakan produksi Indonesia yang masih tergantung dengan serat sintetis yang di impor dari Jepang.

Industri petrokimia di Indonesia yang menghasilkan serat sintetis dan patal di kuasai oleh modal-modal dari Jepang. Damatex dalam waktu singkat akan membangun patal di Tangerang dengan menjalin partner yang berasal dari Jepang. Juga Contex, Unitex, Istem, Primatex dan Imporon, Toray akan mendirikan perusahaan di bidang pemintalan.²³

Investasi-investasi Jepang yang ditanam di Indonesia lebih banyak dilakukan secara Joint Venture dengan perusahaan-perusahaan besar Indonesia. Menurut Shiciro Murai²⁴ senior managing director Sanwa Bank yang diwawancarai pada Tempo, cara Jepang untuk beroperasi di Indonesia dalam situasi Indonesia yang kaya akan faktor-faktor Non-Ekonomisnya adalah dengan melalui Kerjasama yang intim antara partner Jepang dengan partner lokal. Pihak Indonesia yang lebih mengerti keadaan ekonomi di Negerinya, karena sebaiknya kedua belah pihak harus berusaha saling melengkapi kekurangan masing-masing.

Namun istilah saling melengkapi yang di utarakan oleh Shiciro Murai yang berarti bahwa kedua belah pihak saling bekerjasama di dalam menjalankan perusahaan joint venture agaknya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Misalkan proyek hotel yang merupakan usaha bersama antara sarinah dan Ohbayashi Gumi, yang seluruh perencanaan dan pembelian perlengkapan dan peralatan perhotelan didatangkan dari Jepang. Sementara Sarinah hanya menyediakan lahan tanah sebagai investasinya yang kurang dari 20%. Menurut Shiciro Murai²⁵ jalan untuk meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab pengusaha Indonesia adalah dengan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperoleh kredit investasi berbunga rendah.

Hubungan kerjasama Joint Venture jepang dengan pengusaha-pengusaha Indonesia lebih tertarik pada usaha-usaha distributor. Hal tersebut dikarenakan peraturan investasi asing di Indonesia tidak mengizinkan para investor asing memasuki bidang perdagangan, melalui perusahaan distributor produksi perusahaan Jepang akan dapat meluaskan pasarannya di Indonesia. Menurut Isamu Noto²⁶ setelah Jepang menarik diri akan tercipta lebih banyak pengusaha

pribumi yang tidak hanya pintar berproduksi, tetapi juga pandai memasarkan barang produksinya.

Kendala pelaksanaan Joint Venture yang ada di Indonesia adalah kurangnya perusahaan-perusahaan lokal yang akan menjadi partner bagi pengusaha-pengusaha Jepang. Menurut Yoneda²⁷ kedubes Jepang di Jakarta merangkap sebagai kepala bagian PMA, kurangnya partner yang tersedia di Indonesia. Pengusaha-pengusaha besar Indonesia pada awal pembukaan penanaman modal asing menjadi rebutan bagi para investor-investor Jepang dan Amerika. Adanya krisis partner lokal dari pengusaha Indonesia berakibat pada pengusaha Indonesia yang sudah menjalin hubungan partner Join venture dengan pengusaha asing terus menerus terpaksa menerima lamaran baru dari perusahaan asing lainnya. Salah satu contoh adalah pada PT. Limasatu pada tahun 1969 mengadakan usaha joint venture dengan perusahaan Jepang Sankyo Shokuhin Co yang mendirikan pabrik mie PT. Limasatu Sankyo. Kemudian pada tahun berikutnya PT. Limasatu menjalin hubungan joint venture dengan empat perusahaan Jepang lainnya dalam bidang usaha sepeda, tekstil, dan real state.

D. MASALAH INVESTASI ASING JEPANG DI INDONESIA

Perusahaan-perusahaan Jepang menanamkan investasi asingnya hampir di seluruh aspek bidang industri di Indonesia. Bahkan perusahaan-perusahaan Jepang telah mendominasi hampir seluruh sektor industri di Indonesia. Mulai dari sektor laut, kehutanan, pertambangan, kimia, hingga manufaktur berada pada dominasi perusahaan Jepang. Menurut Thee Kian wie²⁸ banyak usaha-usaha PMA yang lebih menyerupai semacam enclave dalam perekonomian Indonesia. Yaitu berada di tengah-tengah perekonomian Indonesia namun tidak merupakan bagian yang integral daripadanya. Sering usaha-usaha PMA hanya menyerupai cabang dari perusahaan-perusahaan asal, dan lebih terintegrasi dengan Negara asal daripada dengan perekonomian Indonesia.

Ketidak integrasinya usaha PMA dengan perekonomian Indonesia disebabkan karena pemerintah Indonesia tidak mengadakan pengawasan terhadap cara kerja usaha PMA di Indonesia. Pemerintah hanya menyediakan badan koordinasi penanaman modal (BKPM) yang hanya bertugas untuk menseleksi permohonan calon investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tidak adanya pengawasan yang

²³ Ibid. Hlm. 47

²⁴ Loc. Cit. *Zaibatasu post Romusha*. Hlm. 39

²⁵ Ibid. Hlm. 39

²⁶ Loc. Cit. *Jepang datang, melihat dan menerkam*. Hlm.45

²⁷ Ibid. Hlm.46

²⁸ *Mencegah kolonisasi Negara kita*. Tempo.15 desember 1973. Hlm.48

ketat dari pemerintah Indonesia mengakibatkan kurangnya pengendalian pemerintah terhadap kegiatan PMA dalam memenuhi syarat-syarat dan patokan yang di setuju oleh kedua belah pihak. Dari syarat-syarat tersebut yang terpenting adalah seberapa jauh usaha-usaha PMA menggunakan pimpinan dan staf Indonesia, serta seberapa jauh usaha-usaha PMA menyediakan latihan untuk tenaga pimpinan, staf, dan tenaga kerja Indonesia yang akan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menggantikan tenaga-tenaga asing.

Pengalihan teknologi yang dilakukan oleh Jepang untuk merintis industrialisasi di Indonesia, dalam prosesnya pihak jeoang hanya meluluskan dalam proses pengalihan ketrampilan baik di bidang management, penjualan dan organisasi. Sedangkan dalam bidang teknologi produksi, proses produksi, pengawasan kualitas, penelitian dan teknologi input, amatlah jarang dilakukan.²⁹ Dalam mengembangkan kemauan industrialisasi untuk kaum pribumi, hanya dengan pelatihan ketrampilan management, penjualan dan organisasi tidaklah cukup. Yang lebih penting adalah dengan strategi produksi dan pengalihan teknologi.

kredit yang diberikan kepada Indonesia demi kepentingan sendiri³⁰, syarat-syarat terpenting dari pengembalian kredit yang di berikan investor asing kepada Indonesia adalah dengan menggunakan hasil investasi tersebut untuk membeli hasil-hasil produksi di Negara pemberi kredit. Kredit yang diberikan Jepang harus diberikan barang-barang yang berasal dari Jepang. Dengan memberikan investasi dalam bentuk industri, demikian akan terdapat siklus yang berputar dimana mereka akan memperoleh keuntungan dengan mendapatkan tempat pasar dan menentukan harga. Keith Shann wakil sekjen departemen luar Negeri Australia,³¹ Dalam pertemuan di tokyo mengungkapkan kritik tajam terhadap cara Jepang dalam memberikan bantuan kredit kepada Indonesia. Menurut pendapat Shan, kredit yang diberikan Jepang kepada Indonesia hanya didorong oleh kepentingan Jepang sendiri. Jepang memberikan bantuan kredit dengan bunga-bunga yang tinggi namun dengan jangka waktu pengembalian yang singkat. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi Indonesia untuk mengembalikan hutang-hutang yang berasal dari Jepang karena dalam pembayarannya kembali telah menjadi tambah besar akibat bunga yang tinggi.

Dalam sektor laut, Pemerintah Indonesia telah memberikan ijin bagi kapal-kapal nelayan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan untuk menangkap ikan di Indonesia.³² hal ini mempersempit wilayah tangkapan ikan bagi nelayan-nelayan Indonesia karena wilayah laut yang telah mendapatkan ijin dari pemerintah Indonesia telah di jadikan wilayah kekuasaan bagi nelayan-nelayan Jepang. Dari kedelapan perusahaan PMA di Indonesia yang mengeksploitasi hasil-hasil laut, semua berasal dari Jepang. menurut pengamatan warta ekonomi maritim,³³ delapan perusahaan PMDN dalam bidang kelautan tidak hanya bergantung pada modal yang di suplay dari Jepang tetapi juga mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari Jepang yang nantinya akan mengambil keputusan dalam menentukan jalannya perusahaan PMDN tersebut. Sebagian besar laut telah menjadi dominasi dari perusahaan-perusahaan Jepang sehingga sering dicegah masalah penangkapan ikan secara besar-besaran tanpa memikirkan kelangsungan hidup kekayaan laut dimasa depan.

Adanya dominasi perusahaan-perusahaan Jepang dalam bidang kelautan membuat semakin sempin wilayah tangkapan para nelayan Indonesia. Sehingga banyak nelayan-nelayan Indonesia yang merugi karena tangkapan ikannya semakin berkurang. Akhirnya Dirjen Perikanan Nizam Zachman³⁴ menempuh kebijakan baru dalam bidang kelautan. Industri perikanan modern hanya di izinkan menjalankan perusahaannya di kawasan Indonesia bagian barat, selat malaka, dan selatan pulau jawa. Sedangkan laut Jawa, selat Karimata, dan selat makasar diperuntukkan bagi para nelayan. Namun kebijakan tersebut nampaknya tidak efektif bagi para nelayan, karena didaerah yang terbagi untuk nelayan merupakan lalu lintas angkatan laut yang cukup ramai.

Jepang juga mendominasi bidang kehutanan, dalam sektor ekstraktif seperti minyak, kayu dan laut merupakan lapangan usaha yang terbuka bagi pengusaha lokal maupun asing. Terlebih lagi dalam usaha perhutanan atau kayu, Indonesia masih belum berpengalaman dalam bidang usaha ini. Pengusaha-pengusaha kayu lokal di pekerjakan dalam bagian penebangan, sementara untuk pengangkutan dipegang oleh Jepang. Salah satu contoh adalah perusahaan HPH yang terikat kongsi dengan perusahaan besar Jepang Ataka, Mitsui, dan Mitsubishi.

²⁹Jepang & Kita oleh Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Tempo. 1 desember 1973. Hlm.49

³⁰Sebabnja Indonesia dibandjiri kredit. Sketmasa. No. 92/Th. XII/1969. Hlm.12

³¹Harian Indonesia Raya. 30 November 1968

³²Kemana modal jang telah di tanam?. Sketmasa. No.79/th.XII/1968. Hlm.8

³³Loc. Cit. Jepang datang, melihat dan menerkam. Hlm.49

³⁴Ibid. Hlm.49

Jepang yang berperan dalam armada pengangkutan kayu sering bertindak yang merugikan pengusaha kayu Indonesia. Kayu-kayu yang di jual kepada importir-importir di pelabuhan hanya dihargai menurut harga FOB, meskipun kayu yang diangkut ke kapal sudah di kir menurut standar internasional oleh graders kehutanan. Setibanya di Jepang kayu-kayu yang telah dikirim di klaim tidak memenuhi standar dengan alasan bahwa standar yang berlaku di Indonesia dengan di Jepang berbeda. Namun dalam hal ini pengusaha Jepang di Indonesia tidak melakukan penyeleksi terhadap kayu yang akan di kirim. Taktik yang diujarkan oleh seorang Tauke kayu di malaysia pada wartawan tempo, bahwa pernah terjadi kayukayu yang sudah dipesan dibiarkan menumpuk disebuah pelabuhan dipesisir kalimantan dengan alasan harga sedang jatuh di Jepang.

Dominasi perusahaan tekstil jepang di Indonesisa telah melemahkan perusahaan-perusahaan tekstil pribumi. Adanya penguasaan petrokimia oleh perusahaan-perusahaan jepang mengakibatkan ketergantungan bahan baku industri tekstil berupa patal secang dan serat sintetis. Perusahaan-perusahaan tekstil indonesia harus mengimpor bahan baku dari Jepang yang mengakibatkan kenaikan biaya produksi. sehingga harga tekstil dari industri Indonesia kalah bersaing dengan industri Jepang dipasaran Indonesia sendiri. Juga adanya pola subcontracting³⁵ yang diterapkan sangat merugikan usaha-usaha kecil rumah tangga pribumi. Industri-industri rumah tangga pembatik-pembatik di kampung-kampung hasil industrinya akan di borong dan dipasarkan melalui grosir-grosir di Jakarta dan Osaka.

Investasi yang dijalankan Jepang telah melanggar patokan yang diterapkan oleh peraturan PMA Indonesia. Investasi Jepang banyak yang masuk dalam usaha-usaha yang telah tertutup bagi investor asing. Diantaranya yaitu masuknya perusahaan Sumitomo Sojhi kedalam sektor penggilingan beras yang seharusnya tertutup bagi investor asing. Juga masuknya invansi perusahaan Jepang pada bidang barang-barang konsumsi sehari-hari dan barang ekspor yang yang beresiko kerugian kecil.

Dalam diskusi modal asing di balai budaya³⁶, menjelaskan bahwa adanya persaingan tidak sehat antara PMA dengan pengusaha pribumi. Namun pemerintah telah memeberikan tindakan preventif dengan mengenakan pajak penjualan yang lebih tinggi terhadap para pengusaha asing. Namun tingkat

management, keunggulan teknologi, kekuatan dalam promosi perusahaan asing lebih kuat daripada perusahaan lokal. Selain adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki pengusaha-pengusaha asing, pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada perusahaan-perusahaan asing dengan adanya kebebasan pajak selama tiga sampai lima tahun. Banyaknya modal asing yang masuk dan bergabung dengan modal nasional hanyalah sebagai pelindung modal asing. Banyak modal yang diberikan kepada PMDN berasal dari pasaran dolar di singapura, Hongkong atau Tokyo. Sedangkan untuk didalam Negeri untuk mendapatkan kredit dari bank pemerintah sangat sulit. Hal seperti ini menimbulkan ketimpangan antara ekonomi pribumi dengan non pribumi.

E. PERISTIWA 15 JANUARI 1974

Peristiwa 15 januari 1974 atau dikenal dengan peristiwa malari, diawali dari letupan-letupan keresahan masyarakat teruma golongan mahasiswa terhadap pelaksanaan penanaman modal asing yang dilakukan oleh Jepang. Keresahan-kerasan yang timbul dimasyarakat dan golongan mahasiswa dipicu karena banyaknya tulisan-tulisan yang dimuat dalam media masa tentang penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan penanaman modal asing yang banyak merugikan perekonomian pribumi.

Tulisan yang di terbitkan pada koran Harian Nusantara,³⁷ menuliskan bahwa gejolak anti Jepang dan Cina kini mulai terasa hangat terlebih lagi dibarengi Universitas di seluruh Indonesia. Di Jakarta, Ujung pandang, dan medan bermunculan poster-poster dan pamflet-pamflet gelap berisi ungkapan-ungkapan perasaan terhadap perbedaan sosial yang menyolok antara usaha-usaha pribumi dengan raksasa-raksasa jepang dan China. Sementara hampir tiap minggu di adakan diskusi-diskusi oleh kaum cendekiawan dan para mahasiswa, dari diskusi-diskusi tersebut yang lebih menonjol adalah perasaan anti Jepang. Dalam diskusi-diskusi yang di lakukan para mahasiswa Jepang selalu akan didengar perkataan mahasiswa sambil mengepalkan tangannya: kendaraan Jepang berbagai perabot rumah tangga Jepang, pakaian jepang, mesin Jepang, dan kini minuman dikuasai oleh Jepang.

Kritik dan serangan juga diutarakan para mahasiswa kepada teknokrat Prof widjojo Nitisastro. Para mahasiswa dari Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta, para mahasiswa memberikan asumsi bahwa para ekonom pemerintah tidak lebih hanya diberikan peranan

³⁵Ibid. Hlm.47

³⁶ *Tulang punggung kurang sumsum*. Tempo. 8 Desember 1973. Hlm.46

³⁷ Marzuki Arifin.1974.*Peristiwa 15 januari 1974*.Jakarta: Publishing House Inc. Hlm. 110

sebagai tukang dan pemancing masuknya bantuan asing oleh pemerintahan Soeharto. Masuknya modal asing yang tidak sejalan dengan strategi dan tujuan pembangunan yang berakibat pada matinya perusahaan-perusahaan modal dalam negeri, sistem percukongan yang menguntungkan para pengusaha-pengusaha non pribumi yang telah melahirkan ketegangan-ketegangan rasial.³⁸

Pada bulan November 1973, Kedatangan J.P Pronk di Jakarta di sambut oleh gerakan mahasiswa Indonesia untuk Indonesia (GMII) dan gerakan mahasiswa Indonesia untuk rakyat Indonesia (GMIRI). Dari demonstrasi tersebut yang sasaran kekesalanyang tadinya diarahkan kepada modal dan bantuan asing secara keseluruhan, kemudian diersempit kepada anti modal Jepang. Selain aksi demonstrasi yang di lakukan oleh para mahasiswa juga terdapat aksi-aksi demonstrasi dari kalangan bukan mahasiswa yang diberi nama Oposisi angkatan muda, namun demonstrasi yang dilakukan tidak terarah dan hanya sebagai gerakan ikut-ikutan yang hanya memicu tindakan anarkis.

Menurut Soemitro³⁹, pada hari-hari pertama bulan Januari kantor Kopkamtib kedatangan rombongan mahasiswa pimpinan Hariman Siregar diana didalamnya juga terdapat mahasiswa dari Universitas Tri sakti. Kedatangan mereka dengan maksud untuk meminta ijin diadakannya demonstrasi. Para mahasiswa berkeinginan untuk mengadakan demonstrasi menyambut kedatangan perdana menteri Jepang, Tanaka. Dalam perohonan izin tersebut Soemitro menerangkan bahwa melarang untuk melakukan demonstrasi di Jalan. Para mahasiswa tersebut menginginka untuk berdialog langsung dengan Tanaka. Kemudian Soemitro menjembatani kedua belah pihak dan merencanakan diadakannya dialog dengan Tanaka pada tanggal 16 Januari 1974. Namun pihak mahasiswa yang diwakili oleh Hariman Siregar mengganti dialog tersebut dengan dialog jalanan.

Pada saat Soemitro mengikuti Rapat Wanjakti (desan Jabatan dan kepangkatan perwira Tinggi),⁴⁰ beliau mendapatkan kabar dari Laksamana Sudhomo meberikan kabar kepada Soemitro bahwa keadaan Ibu kota semakin gawat. Kemudian terdapat berita kembali dari Brigjen Herman Sarens bahwa terjadi pembakaran di dapan muka kedutaan Besar Jepang di Tamrin, terjadi perampokan di Glodog, Pasar Senin, bahkan hingga laporan akan terjadi pembakaran di Blok M. Namun aksi

tersebut dapat diatasi oleh Soemitro dan menghalangi para demonstiran untuk tidak sampai menembus monas hingga ke Istana.

Aksi masa yang dilakukan oleh para mahasiswa ditujukan kepada pembakaran produk-produk dan semua hal yang berkaitan dengan PMA Jepang. Diantaranya aksi masa yang dilakukan para mahasiswa adalah dengan mencegat mobil-mobil dan motor buatan Jepang. Para penumpangnya dipaksa turun, kendaraanya digulingkan dan kemudian di bakar.yang kemudian masa bergerak ke kantor Astra yang merupakan importir mobil-mobil Jepang, pengrusakan terjadi di kantor tersebut serta merusak kendaraan-kendaraan buatan Jepang di daerah sekitar kantor Astra. Namun aksi pengrusakan tidak hanya tertuju pada kantor Astra, namun juga di klub malam, steambath, bar, toko-toko dan restoran-restoran di daerah Blora yang hanya terpisah beberapa meter dari kantor Astra.⁴¹

PENUTUP

Simpulan

Sejak dibukanya kebijakan penanaman modal asing di Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan dari Jepang menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi-investasi Jepang yang paling menonjol di Indonesia adalah dalam sektor pertambangan. Pemerintah Indonesia telah memberikan izin bagi perusahaan Jepang untuk menanamkan modalnya pada bidang kehutanan dan kelautan yang berakibat pada eksploitasi besar-besaran dari perusahaan Jepang tanpa melihat kelangsungan sumber daya alam Indonesia. Para perusahaan Jepang berada di tengah perekonomian Indonesia namun tidak menjadi bagian yang integral terhadap ekonomi Indonesia sehingga hanya mementingkan kepentingan pengusaha Jepang. Perusahaan investasi asing Jepang di Indonesia mendominasi hampir semua bidang usaha di Indonesia. Adanya kesenjangan yang terjadi antara perusahaan Jepang dengan pribumi menimbulkan keresahan dan aksi protes dari kalangan mahasiswa. Aksi protes yang terjadi berujung pada demonstrasi secara rusuh yang menimbulkan aksi-aksi pembakaran dan penjarahan terhadap barang-barang yang berkenaan dengan Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip :

Undang-undang No.1 Tahun 1967 Tentang penanaman modal asing

Surat kabar :

³⁸ *Kini teknokrat sebagai tergugat*. Tempo. 1 desember 1973. Hlm.5

³⁹ Heru Cahyono. *Pangkopkamtib Jendral Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1998. Hlm.214

⁴⁰ *Ibid*. Hlm.219

⁴¹ Marzuki Arifin. *Loc. Cit*. Hlm.159

- Harian Indonesia Raya. *Australia mengetjam tjara Djepang memberikan bantuan kepada Indonesia*. 30 November 1968
- Kompas. *penanaman modal asing agar di prioritaskan pada usaha-usaha yang menampung pekerja*. 23 januari 1971
- Kompas. *amerika serikat juarai penanaman modal asing di Indonesia*. 8 maret 1971
- Prisma. *Ekspansi ekonomi Jepang ke Asia Tenggara: tinjauan perdagangan Jepang dan ASEAN oleh Okada Osamu*. 11 November1979
- Sketmasa. *Sebabnja Indonesia dibandjiri kredit*. Edisi 92 No.92-th-XII-1969
- Sketmasa. *Kunci hubungan kerjasama Indonesia-Jepang*. No.19/XXII/16-30september 1980
- Sketmasa. *Kemana modal jang telah di tanam?*. No.79/th.XII/1968
- Tempo. *Jepang datang melihat & menerkam*. 15 september 1973
- Tempo. *Zaibatsu Post Romusha*. 1 Agustus 1973
- Tempo. *Mencegah kolonisasi Negara kita oleh Thee Kian Wie*. 15 desember 1973
- Tempo. *Jepang & Kita oleh Dorodjatun Kuntjoro Jakti*. 1 desember 1973
- Tempo. *Tulang punggung kurang sumsum*. 8 desember 1973
- Tempo. *Kini teknokrat sebagai tergugat*. 1 desember 1973
- BUKU**
- Aminuddin Ilmar. 2005. *Hukum penanaman modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Heru Cahyono. 1998. *Pangkopkamtib Jendral Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Marzuki Arifin. 1974. *Peristiwa 15 januari 1974*. Jakarta: Publishing House Inc

